



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggungjawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, 26 Maret 2024

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI, SH.,M.Pd.

Pembina Utama Muda
NP 19680327 199603 1 003



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja pada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada taun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka yang disingkat Disarpusda setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

a. Kedudukan

Berdasarkan Perbup 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Perbup No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Dinas Arsip dan

Perpustakaan Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perpustakaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPT

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Dinas dalam melaksanakan kebijakan terkait arsip dan perpustakaan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum Bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, serta Bidang Perpustakaan;
- b. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan urusan Bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, serta Bidang Perpustakaan;
- c. pembinaan, pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi pelaporan Bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, serta Bidang Perpustakaan.

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Keuangan.. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi program kerja Sekretariat;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. pelaksanaan fasilitasi Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang pengelolaan, layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi program kerja Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan

teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi program kerja Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Bidang Perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi program kerja Bidang Perpustakaan;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perpustakaan; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi Bidang Perpustakaan.

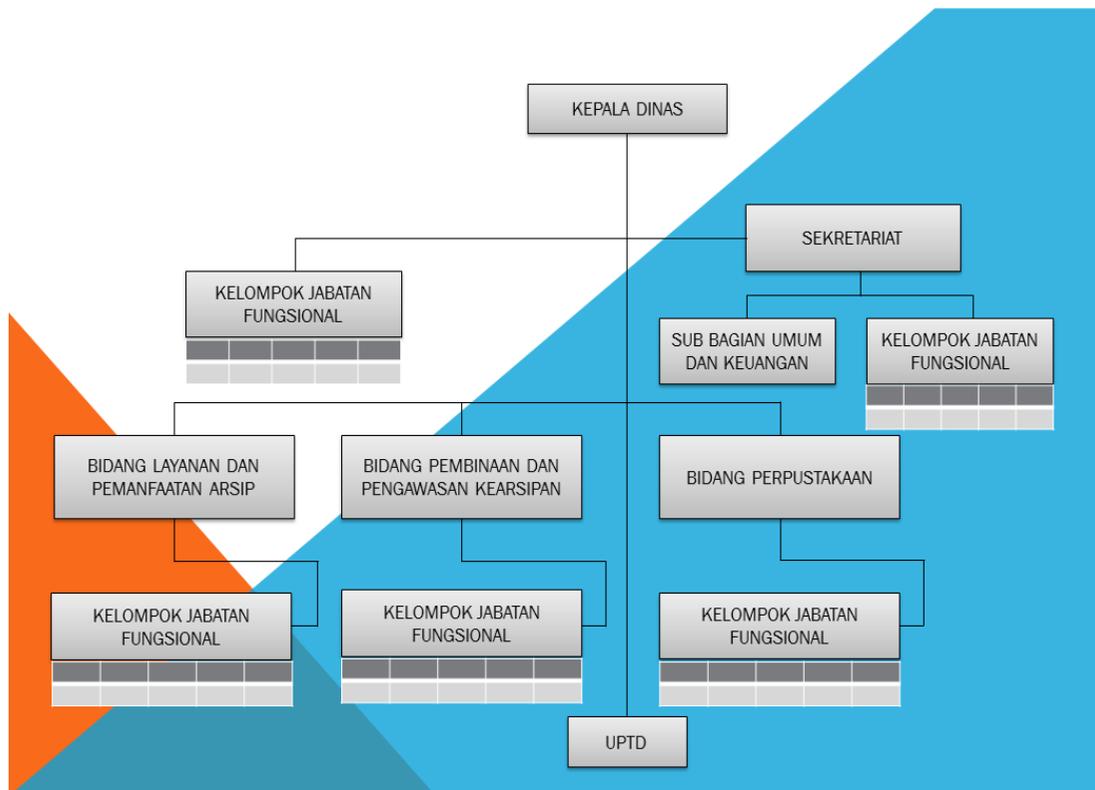
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kearsipan dan perpustakaan;

Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

Berikut Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka berdasarkan lampiran XVIII Peraturan Bupati Majalengka No. 69 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka



1.2 Data Pegawaiian



Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 22 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 11 orang

Laki-Laki : 11 orang

b. Eselon

Eselon II b : 1

Eselon III a : 1

Eselon III b : 3

Eselon IV a : 1

c. Golongan

Unsur PNS	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
PNS	-	1	14	7
PPPK	-	-	-	-

Sumber data : *Ur. Kepegawaian Disarpusda periode Januari s.d Desember 2023*

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 1 orang

Jabatan Administrator : 4 oarang

Jabatan Pengawas : 1 orang

Jabatan Fungsional : 12 orang

Jabatan Pelaksana : 4 orang

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
-	-	2	-	1	1	13	5	-

Sumber data : *Ur. Kepegawaian Disarpusda periode Januari s.d Desember 2023*

1.3 Isu Strategis

Isu strategis dalam implementasi kebijakan publik dapat merupakan masalah yang belum diselesaikan, dan sebagai bagian dari peran utama badan-badan publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi organisasi. Dan masalah yang telah diidentifikasi sebagai suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pelayanan publik menjadi isu kian strategis manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini, sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan dan kearsipan, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Jika dicermati secara seksama, maka terdapat hal-hal penting yang menjadi isu strategis Disarpusda Kabupaten Majalengka yaitu:

1. Penatakelolaan arsip di daerah masih rendah
2. Minat baca masyarakat masih rendah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah serta SK Tim Penyusunan LKIP

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam membantu pencapaian visi misi Kabupaten Majalengka, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka memiliki tujuan dan sasaran pelayanan yang terukur secara kuantitatif melalui indikator kinerja. Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Berikut ini disajikan tabel pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah periode jangka menengah tahun 2018-2023 sebelum dan sesudah adanya perubahan dokumen rencana strategis.

**TABEL.2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019-2023
SEBELUM PERUBAHAN**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satu-an	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(8)	(9)	(11)	(13)	(15)	(17)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Serta Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran serta Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran serta Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran tiap tahun	%	100	100			
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	100			

				Persentase Pelaksanaan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	100			
2	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Sesuai Standar Baku Kearsipan	Meningkatkan Upaya Penyelamatan, Pelestarian dan Pendayagunaan Arsip	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyimpanan Arsip berdasarkan Standar Baku kearsipan	Persentase Kapasitas Penyimpanan Arsip	OPD	9 OPD, 9 Kec. 9 Desa	34 OPD			
				Tersimpannya Data Arsip Statis/In Aktif secara Elektronik	Dok		100			
				Dilaksanakannya Aplikasi SIM Kearsipan	Dok		100			
				Terlaksananya penyusunan auto Biografi Bupati Majalengka yang terpilih langsung oleh masyarakat	Dok		1 Dok			
				Terlaksananya Akuisisi	Dok		8 Opd			
				Terlaksananya Fumigasi Arsip	Dok		2 Kali			
3	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Sesuai Standar Baku Kearsipan	Meningkatkan Upaya Pembinaan SDM Penyelamatan, Pelestarian dan Pendayagunaan Arsip	Meningkatnya Pembinaan Lembaga dan SDM Kearsipan	Persentase Arsip Statis yang diselamatkan	%	100	100			
				Terbinanya 399 SDM Kearsipan/pengelola arsip	Dok	20 Orang	78 orang			
				Terselamatkannya Khasanah Arsip dari 24 OPD	Dok	9 OPD, 9 Kec. 9 Desa	14 OPD			
4	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Sesuai Standar Baku Kearsipan	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kearsipan		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Standar Baku Kearsipan	OPD		100			
				Tersedianya Sentral File dan Pengelola Kearsipan di OPD	OPD		14 OPD			
				Terbinanya Arsip OPD	OPD		14 OPD			
5	Mengembangkan Budaya Baca dan Pembinaan	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	Meningkatnya Angka Kunjungan Ke	Rasio Kunjungan Perpustakaan Per tahun	Dok	52,08	55			

	Perpustakaan		Perpustakaan	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan	Keg.	100				
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Masyarakat (Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca)	Keg.	85.00 0 EKS				
				Terbinanya 749 pengelola Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Dok	100	3 TBM, 6 Rum- ah Baca	3 TBM, 6 Rum- ah Baca	3 TBM, 6 Rum- ah Baca	3 TBM, 6 Rumah Baca
				Meningkatnya Indeks Baca Masyarakat	Dok	52,08	55	65	75	80

Tabel 2.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019-2023
(SETELAH PERUBAHAN ke-1 RENSTRA)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca (nilai)	-	-	47,5	49	-
		Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan membaca	Indeks pembangunan literasi masyarakat (nilai)	-	-	1,79	-	-
2	Meningkatkan tata kelola kearsipan sesuai standar kearsipan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip di setiap pencipta arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban (nilai)	-	-	48	50	-
3	Mengembangkan kelembagaan dan SDM kearsipan dan perpustakaan	Meningkatkan pembinaan lembaga teknis kearsipan dan perpustakaan	Rasio pengelola arsip (persen)	-	-	100	100	-
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban (nilai)	-	-	58,33	58,33	-
			Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana pendukung urusan kearsipan dan perpustakaan (persen)	-	-	100	100	-

Tabel 2.3
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019-2023
(SETELAH PERUBAHAN ke-2 RENSTRA)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	-	-	-	79,50	80,00
2	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Arsip terkelola secara tertib	Indeks Kearsipan (nilai)	-	-	-	-	67,34

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019-2023
Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Sebelum Perubahan														
1	Meningkatkan tatakelola arsip sesuai standar baku kearsipan	Meningkatnya tata kelola kerasipan	Persentase pencipta arsip yang melaksanakan tata kelola kearsipan secara baku	Persen	57,60	63,60	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	65,28	65,72	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan perpustakaan	Nilai IKM Pelayanan perpustakaan	Nilai	BB	BB	-	-	-	-	-	-	-	-
Setelah Perubahan ke 1														
1	Meningkatnya indeks budaya baca	Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	persen	-	-	-	-	-	-	-	47,5	49	-
		Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap membaca	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	-	-	-	-	-	-	-	1,79	-	-

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Meningkatkan tatakelola kearsipan sesuai standar kearsipan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	-	-	-	-	-	-	-	48	50	-	
3	Mengembangkan kelembagaan dan SDM kearsipan dan perpustakaan	Meningkatnya pembinaan lembaga teknis kearsipan dan perpustakaan	Rasio pengelola arsip	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	58,33	58,33	-
			Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana pendukung urusan kearsipan dan perpustakaan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Setelah Perubahan ke 2															
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	79,50	80,00	
2	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Arsip terkelola secara tertib	Indeks Kearsipan	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,34	

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	51
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan membaca	Indeks pembangunan literasi masyarakat	1,81
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip di setiap pencipta arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	52
4.	Meningkatnya pembinaan lembaga teknis kearsipan dan perpustakaan	Rasio pengelola arsip	100
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	58,33
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB
		Nilai SKM Perangkat Daerah	BB

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	80,00
2.	Arsip terkelola secara tertib	Indeks kearsipan	67,34

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Arsip dan

Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang bersumber dari APBD dan DAK Propinsi yang terdiri dari :

Tabel 2.6
Rencana Anggaran Tahun 2023

Program	Rencana Anggaran		Jumlah Pagu	(%)
	APBD	DAK		
Pembinaan Perpustakaan	131.147.000	950.000.000	1.081.147.000	20,40
Pengelolaan Arsip	114.263.000		114.263.000	2,16
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	36.592.500		36.592.500	0,69
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.068.080.623		4.068.080.623	76,76
Jumlah Anggaran	4.350.083.123	950.000.000	5.300.083.123	100

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 108,22 %. Sebanyak 2 indikator mencaapai kinerja lebih dari 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Capaian IKU

103,75



IKU 1

112,68



IKU 2

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

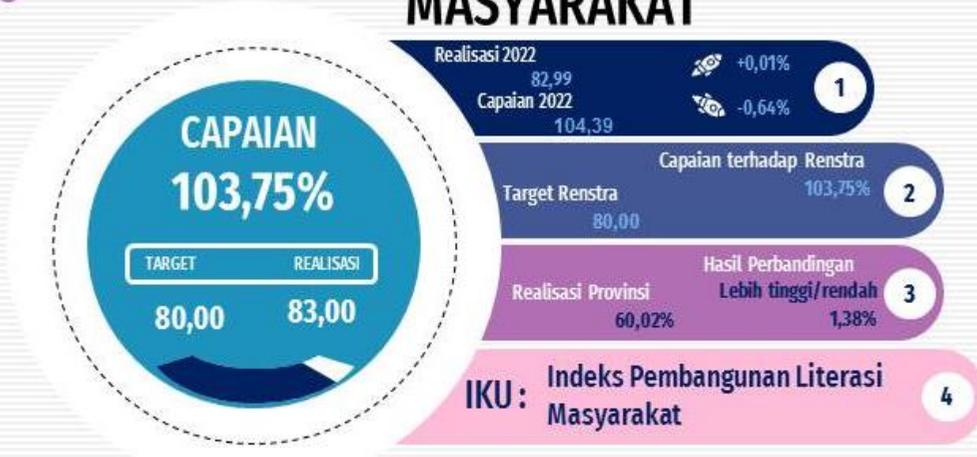
Capaian Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 2 sasaran dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 108,22%. Dari dua indikator sasaran yang ditargetkan, mencapai kinerja lebih dari 100%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	80	83,00	103,75
2.	Arsip terkelola secara tertib	Indeks kearsipan	67,34	75,88	112,68



INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT



FAKTOR

- Nilai IPLM diukur dengan menggunakan metode sensus dengan mengukur sejumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM)

PROGRAM

- Program Pembinaan Perpustakaan

EFISIENSI

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada Program Pembinaan Perpustakaan sebesar 5,19%



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	80	83,00	103,75

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data indeks tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data skunder dan aspek masyarakat (AM) yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka melalui bidang urusan Perpustakaan dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Jalan Raya Cigasong-Jatiwangi Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka 45476
Call Center 08111110123 Email : disarpusda@gmail.com

REKAPITULASI DATA IPLM TAHUN 2024

NAMA PROV/KAB/KOTA	JUMLAH LEMBAGA				JUMLAH SEKOLAH						Jumlah PT	Jumlah Instansi Pemerintah (OPD)
	Provinsi	Kab	Kec	Desa/Kel	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK		
Kab. Majalengka	1	26	343	671	87	125	88	25	56	39	7	

NAMA PROV/KAB/KOTA	Provinsi	POPULASI SISWA						POPULASI GURU						POPULASI MAHASISWA	POPULASI DOSEN	
		SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK			MA
Kab. Majalengka		112013	11123	28337	18518	18984	23287	7686	5931	805	2258	1618	951	1577	555	

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN											TOTAL KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN	SKOR UPLM1 PROV/ KAB/KOTA	
	PERPUSTAKAAN UMUM				PERPUSTAKAAN SEKOLAH						PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI			PERPUSTAKAAN KHUSUS (INSTANSI DAERAH)
Kab. Majalengka	1	4	174	655	84	97	84	22	57	33	7		1218	

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN (JUDUL PER ORANG)											TOTAL KOLEKSI PERPUSTAKAAN	SKOR UPLM2 PROV/ KAB/KOTA	
	PERPUSTAKAAN UMUM				PERPUSTAKAAN SEKOLAH						PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI			PERPUSTAKAAN KHUSUS
Kab. Majalengka	33,986	65,000	200,000	500,000	300,000	400,000	300,000	250,000	250,000	150,000	90,000	150,000	2,688,986	

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN (ORANG)											TOTAL TENAGA PERPUSTAKAAN	SKOR UPLM3 PROV/ KAB/KOTA	
	PERPUSTAKAAN UMUM				PERPUSTAKAAN SEKOLAH						PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI			PERPUSTAKAAN KHUSUS
Kab. Majalengka	5	4	167	655	84	79	84	22	57	33	21	84	1295	

PROVINSI/KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KUNJUNGAN MASYARAKAT PER HARI											TOTAL KUNJUNGAN MASYARAKAT PER HARI	SKOR UPLM4 PROV/ KAB/KOTA		
	PERPUSTAKAAN UMUM				PERPUSTAKAAN SEKOLAH						PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI			PERPUSTAKAAN KHUSUS	
Kab. Majalengka	1000	1500	1500	2000	1500	1500	1500	1500	2000	1800	1500	1400	1500	18700	

PROVINSI/KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PERPUSTAKAAN YANG TELAH TERAKREDITASI DAN SEDANG DIBINA SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN											TOTAL PERPUSTAKAAN YANG DIBINA SESUAI SNP	SKOR UPLM5 PROV/ KAB/KOTA		
	PERPUSTAKAAN UMUM				PERPUSTAKAAN SEKOLAH						PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI			PERPUSTAKAAN KHUSUS	
Kab. Majalengka	1		1				12		13			3	4	34	

UPLM 6															
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM SOSIALISASI PERPUSTAKAAN												TOTAL KETERLIBATAN MASYARAKAT	SKOR UPLM6 PROV/KAB/KOTA	
	PERPUSTAKAAN UMUM				PERPUSTAKAAN SEKOLAH						PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	PERPUSTAKAAN KHUSUS			
	PROVINSI	KAB/KOTA	KEC	DESA/KEL	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK					MA
Kab. Majalengka	25881	0	389	120542		42395		87864				9509	376156	662736	

UPLM 7															
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANGGOTA PERPUSTAKAAN												TOTAL ANGGOTA PERPUSTAKAAN	SKOR UPLM7 PROV/KAB/KOTA	
	PERPUSTAKAAN UMUM				PERPUSTAKAAN SEKOLAH						PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	PERPUSTAKAAN KHUSUS			
	PROVINSI	KAB/KOTA	KEC	DESA/KEL	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK					MA
Kab. Majalengka	18055	45	135	57023		40058		9300				9109	420	134145	

Provinsi/Kabupaten/Kota	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM	KATEGORI IPLM
Kab. Majalengka	1.0000	0.9946	1.0000	0.6917	0.1247	1.0000	1.0000	83,00	79,99



Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka
GHIN GHIN MOHAMAD DHARMADI, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680327 199603 1 003

Sumber data : Bidang Perpustakaan | Laporan hasil kajian IPLM 2023

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis meningkatnya literasi masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2023 melebihi target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 103,75%. Sedangkan target IPLM pada tahun 2023 sebesar 80,00 namun realisasinya sebesar 83,00.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan /Penurunan
Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	83,00	82,99	+0,01

UPLM 6													
PROVINSI	KAB/KOTA	JUMLAH KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM SOSIALISASI PERPUSTAKAAN						JUMLAH KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM SOSIALISASI PERPUSTAKAAN					
		PROVINSI	KAB/KOTA	SD	SMK	SLB	UM	PROVINSI	KAB/KOTA	SD	SMK	SLB	UM
Jawa Barat	Kab. Majalengka	2.583	1	0	387	1.254	42.55	2.583	1	0	387	1.254	42.55
UPLM 7													
PROVINSI	KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA PERPUSTAKAAN						JUMLAH ANGGOTA PERPUSTAKAAN					
		PROVINSI	KAB/KOTA	SD	SMK	SLB	UM	PROVINSI	KAB/KOTA	SD	SMK	SLB	UM
Jawa Barat	Kab. Majalengka	1.835	45	135	3.702	0.187	83,00	1.835	45	135	3.702	0.187	83,00

Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka

Gub. Kabupaten Majalengka
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Jl. Pemuda Utama Muda
No. 19880327/1988031/003

Kode	KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM
32.07	Ciamis	0,0032	1,4042	0,0048	0,4533	1,6240	0,1616	0,8825	64,76
32.08	Kuningan	0,0018	0,9541	0,0001	0,2490	1,5750	0,1503	0,6654	51,36
32.09	Cirebon	0,0017	1,3009	0,0007	0,3353	2,1577	0,2534	0,9594	71,55
32.10	Majalengka	0,0024	1,7554	0,0020	0,4890	2,4810	0,2506	0,8285	82,99

Pencapaian nilai IPLM Provinsi Jawa Barat sebesar **72,73** dan masuk ke dalam **Kategori Sedang**. Tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Depok 98,92, Kota Cimahi 98,83, dan Kota Sukabumi 96,85. Sedangkan, tiga Kab/Kota yang terendah yaitu Kab. Sukabumi 50,29, Kab. Sumedang 48,73, dan Kab. Subang 46,33.

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT : 72,73			
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,0024	Jumlah Penduduk (BPS 2020) 49.935.858 Jumlah Penduduk Usia Sekolah (Kemendikbud dan BPS 2022) 10.208.720 Jumlah Penduduk Usia Perguruan Tinggi (BPS 2022) 1.002.236
2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)	1,4898	
3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,0024	
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)	0,4277	
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	2,1987	
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	0,2767	
7	Jumlah Pemustaka (UPLM7)	0,6934	

Capaian IPLM Kabupaten Majalengka Tahun 2023	Capaian IPLM Kabupaten Majalengka Tahun 2022
--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja utama indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding dengan nilai capaian tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	83,00	80,00	103,96

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil perbandingan capaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada target akhir Renstra 2018-2023

melebihi dari target yang ditetapkan. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah melalui bidang urusan perpustakaan melaksanakan penghitungan mandiri pada akhir periode bulan januari sampai dengan desember tahun 2023. Hasil nilai indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Kabupaten Majalengka sebesar 83,00, sehingga hasil perbandingan dengan target akhir renstra sebesar 103,96 %.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	83,00	60,02	138,29

Berdasarkan tabel diatas pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 60,02 dan termasuk dalam **kategori sedang**. Jika capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Majalengka tahun 2023 dibandingkan dengan capaian IPLM Propinsi Jawa Barat, maka capaian Kabupaten Majalengka sebesar 138,29.



PROVINSI/KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
Kab. Cirebon	0,4454	0,0456	0,0918	0,0250	1,0000	1,0000	1,0000	51,54
Kab. Garut	0,2913	0,1676	0,1808	0,0102	1,0000	1,0000	0,7950	49,21
Kab. Indramayu	1,0000	0,4854	0,6558	0,6193	1,0000	0,4040	1,0000	73,78
Kab. Karawang	0,5072	0,2391	0,0768	0,0745	0,3307	1,0000	1,0000	46,12
Kab. Kuningan	0,8079	0,1710	0,5518	0,0176	0,2289	1,0000	1,0000	53,96
Kab. Majalengka	0,6055	0,0678	0,6552	0,0238	1,0000	0,7408	1,0000	58,47
Kab. Pangandaran	0,1530	0,3455	0,0636	0,2580	1,0000	0,3197	1,0000	44,85
Kab. Purwakarta	0,4709	0,1873	0,2066	0,0235	1,0000	1,0000	1,0000	55,55
Kab. Subang	0,3773	0,0502	0,1047	0,0095	1,0000	1,0000	0,7927	47,63
Kab. Sukabumi	0,2638	0,0808	0,0534	1,0000	1,0000	0,4941	1,0000	55,60
Kab. Sumedang	0,7972	0,2831	0,0728	0,7362	1,0000	0,3986	1,0000	61,26
Kab. Tasikmalaya	0,3384	0,2568	0,0629	0,0152	1,0000	1,0000	1,0000	52,48
Kota Bandung	0,9648	0,9802	0,2844	0,4515	0,6179	1,0000	1,0000	75,70
Kota Banjar	1,0000	0,2902	0,4359	0,0731	1,0000	1,0000	1,0000	68,56
Kota Bekasi	0,3829	0,0684	0,1593	0,0145	1,0000	1,0000	1,0000	51,79
Kota Bogor	0,4660	0,0892	0,9497	0,0102	1,0000	0,1252	1,0000	52,00
Kota Cimahi	0,7276	0,1336	0,1565	0,0267	1,0000	1,0000	1,0000	57,78
Kota Cirebon	1,0000	0,6369	0,5055	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	87,75
Kota Depok	0,4860	1,0000	0,2837	0,4412	1,0000	1,0000	1,0000	74,44
Kota Sukabumi	0,8695	0,4245	1,0000	0,4566	1,0000	1,0000	1,0000	82,15
Kota Tasikmalaya	0,6511	0,4038	0,2965	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	76,45

Berdasarkan tabel di atas pencapaian IPLM Provinsi Jawa Barat sebesar Jawa Barat sebesar **60,02** dan masuk dalam **kategori sedang**. Tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Cirebon 87,75; Kota Sukabumi 82,15; dan Kota Tasikmalaya 76,45. Sedangkan tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Cianjur 28,13; Kab. Bekasi 36,40; dan Kab. Bogor 38,19.

Berikut sajian rincian data nilai IPLM Provinsi Jawa Barat tahun 2023 beserta interpretasinya.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan Upaya yang dilakukan di tahun depan



Faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal diantaranya adalah :

1) Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan jajaran staf di lingkup urusan perpustakaan.

2) Kerjasama antara Disarpusda dan Dinas Pendidikan dalam peningkatan literasi di daerah

terutama pada tingkat sekolah dasar dan paud sudah terjalin dengan baik.

- **Upaya yang telah dilakukan**

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka



melalui bidang perpustakaan telah melakukan perhitungan mandiri dengan data periode bulan januari sampai dengan desember 2023 dan berkordinasi dengan PERPUSNAS R.I untuk direvisinya hasil kajian IPLM tahun 2023.



Penyelenggaraan lomba-lomba disetiap tahun anggaran yang melibatkan komunitas, sekolah-sekolah baik tingkat TK, SD maupun kader PKK, dan lomba pemilihan Duta Baca Kabupaten Majalengka dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan literasi di Kabupaten Majalengka.

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka antara lain adalah :

- 1) Penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.
- 2) Meningkatkan Koordinasi dan dukungan dari para pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya dalam mendukung kebijakan daerah.
- 3) Lebih sistematis dan terukur dalam menentukan target capaian perangkat daerah dimasa yang akan datang.



6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Pembinaan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	43,025.000

7. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) pada sasaran meningkatnya literasi masyarakat yaitu sebesar 0,70% atau sebesar Rp. 300.000 dari pagu total anggaran Rp. 43,025.000 dan realisasinya sebesar Rp. 42.725.000,-.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	83,00	94,81



INDEKS KEARSIPAN



FAKTOR

- Nilai indeks kearsipan merupakan akumulasi dari hasil penilaian terhadap pengelolaan arsip di OPD dengan bobot 40% dan LKD 60%. Adapun instrumen yang dinilai dari mulai aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, penciptaan hingga sarana dan prasarana kearsipan

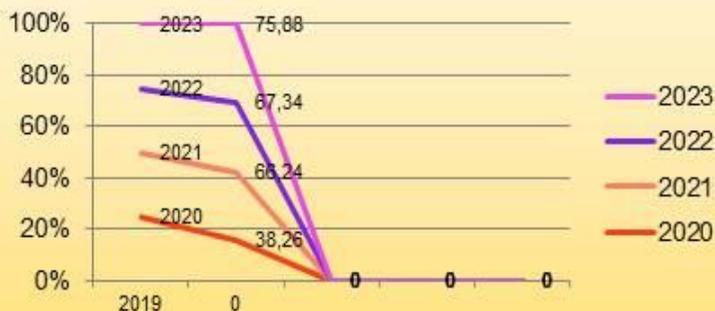
- Program Pengelolaan Arsip

PROGRAM

EFISIENSI

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis Nilai Indeks kearsipan pada Program Pengelolaan Arsip sebesar 1,39 persen

Nilai Indeks Kearsipan



INDIKATOR 2

Indeks Kearsipan

Indeks Kearsipan yang meliputi Nilai Pengawasan Kearsipan merupakan salah satu indikator capaian kinerja Perangkat Daerah oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan sesuai standar nasional. Pengawasan kearsipan terdiri dari pengawasan kearsipan eksternal dan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal dilakukan ANRI dan Pemerintah Provinsi terhadap pencipta arsip sesuai wilayah kewenangannya, sedangkan Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan masing-masing.

Pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan kearsipan yang terdiri dari: aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, aspek program kearsipan, aspek pengelolaan arsip inaktif, aspek penyusutan arsip, aspek sumber daya manusia kearsipan, aspek kelembagaan serta aspek prasarana dan sarana kearsipan. Indeks Kearsipan merupakan akumulasi dari hasil penilaian terhadap pengelolaan arsip di OPD (bobot: 40%) dan LKD (bobot: 60%).

Kategori penilaian indeks kearsipan dari hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
4. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
5. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
6. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
7. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Arsip terkelola secara tertib	Indeks kearsipan	67,34	75,88	112,68



PENGUMUMAN
NOMOR: AK.01.00/23/2023
TENTANG
HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap kementerian, lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Kearsipan, serta pemerintah provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Nilai hasil pengawasan kearsipan pada kementerian, lembaga tingkat pusat, pemerintah provinsi, dan perguruan tinggi negeri ditetapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2023 serta nilai hasil pengawasan kearsipan pada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 428 Tahun 2023. Berdasarkan Keputusan tersebut, kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi negeri yang tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal dinyatakan **tidak diberikan kategori** karena tidak memenuhi salah satu komponen nilai dalam pengawasan kearsipan yaitu pengawasan kearsipan internal, sedangkan bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak dilakukan pengawasan kearsipan dinyatakan **tidak diberikan opini** karena tidak terpenuhi seluruh komponen penilaian, baik pengawasan kearsipan eksternal maupun internal.

Peringkat nasional hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 bagi kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi negeri sebagaimana terlampir.

Pemerintah kabupaten/kota yang ingin mendapatkan detail hasil pengawasan kearsipan dapat menghubungi Lembaga kearsipan daerah provinsi masing-masing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

kearsipan pada tahun 2023 sebesar 67,34 dan realisasinya sebesar 75,88.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis arsip terkelola secara tertib dengan indikator Indeks kearsipan tahun 2023 melampaui target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 112,68%. Sedangkan target Indeks

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-10-

NO	Provinsi	Kabupaten/Kota	KATEGORI
50	Jawa Barat	Kota Bogor	A (MEMUASKAN)
51	Jawa Tengah	Kota Salatiga	A (MEMUASKAN)
52	Jawa Tengah	Kabupaten Wonogiri	A (MEMUASKAN)
53	Jawa Tengah	Kabupaten Purworejo	A (MEMUASKAN)
54	Jawa Tengah	Kota Surakarta	A (MEMUASKAN)
55	Jawa Timur	Kabupaten Kediri	A (MEMUASKAN)
56	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	A (MEMUASKAN)
57	Banten	Kota Cilegon	A (MEMUASKAN)
58	Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar	A (MEMUASKAN)
59	Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	A (MEMUASKAN)
60	Jawa Tengah	Kabupaten Pati	BB (SANGAT BAIK)
61	Jawa Tengah	Kabupaten Kendal	BB (SANGAT BAIK)
62	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Belitung Timur	BB (SANGAT BAIK)
63	Maluku	Kabupaten Seram Bagian Timur	BB (SANGAT BAIK)
64	Jawa Timur	Kota Pasuruan	BB (SANGAT BAIK)
65	Jawa Timur	Kabupaten Malang	BB (SANGAT BAIK)
66	Banten	Kabupaten Tangerang	BB (SANGAT BAIK)
67	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	BB (SANGAT BAIK)
68	Jawa Tengah	Kabupaten Grobogan	BB (SANGAT BAIK)
69	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	BB (SANGAT BAIK)
70	Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan	BB (SANGAT BAIK)
71	Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	BB (SANGAT BAIK)
72	Jawa Tengah	Kabupaten Karanganyar	BB (SANGAT BAIK)
73	Bengkulu	Kabupaten Lebong	BB (SANGAT BAIK)
74	Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	BB (SANGAT BAIK)
75	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	BB (SANGAT BAIK)
76	Jawa Barat	Kota Cirebon	BB (SANGAT BAIK)
77	Riau	Kabupaten Siak	BB (SANGAT BAIK)
78	Bengkulu	Kabupaten Rejang Lebong	BB (SANGAT BAIK)
79	Jawa Barat	Kota Cimahi	BB (SANGAT BAIK)
80	Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	BB (SANGAT BAIK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan /Penurunan
Arsip terkelola secara tertib	Indeks kearsipan	75,88	67,34	8,54

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis arsip terkelola secara tertib dengan indikator kinerja utama indeks kearsipan pada tahun 2023 mengalami peningkatan 8,54% dibanding dengan nilai capaian tahun 2022.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-10-

NO	Provinsi	Kabupaten/Kota	KATEGORI
50	Jawa Barat	Kota Bogor	A (MEMUASKAN)
51	Jawa Tengah	Kota Salatiga	A (MEMUASKAN)
52	Jawa Tengah	Kabupaten Wonorejo	A (MEMUASKAN)
53	Jawa Tengah	Kabupaten Purworejo	A (MEMUASKAN)
54	Jawa Tengah	Kota Surakarta	A (MEMUASKAN)
55	Jawa Timur	Kabupaten Kediri	A (MEMUASKAN)
56	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	A (MEMUASKAN)
57	Banten	Kota Cilegon	A (MEMUASKAN)
58	Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar	A (MEMUASKAN)
59	Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	A (MEMUASKAN)
60	Jawa Tengah	Kabupaten Pati	BB (SANGAT BAIK)
61	Jawa Tengah	Kabupaten Kendal	BB (SANGAT BAIK)
62	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Belitung Timur	BB (SANGAT BAIK)
63	Maluku	Kabupaten Seram Bagian Timur	BB (SANGAT BAIK)
64	Jawa Timur	Kota Pasuruan	BB (SANGAT BAIK)
65	Jawa Timur	Kabupaten Malang	BB (SANGAT BAIK)
66	Banten	Kabupaten Tangerang	BB (SANGAT BAIK)
67	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	BB (SANGAT BAIK)
68	Jawa Tengah	Kabupaten Grobogan	BB (SANGAT BAIK)
69	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	BB (SANGAT BAIK)
70	Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan	BB (SANGAT BAIK)
71	Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	BB (SANGAT BAIK)
72	Jawa Tengah	Kabupaten Karanganyar	BB (SANGAT BAIK)
73	Bengkulu	Kabupaten Lebong	BB (SANGAT BAIK)
74	Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	BB (SANGAT BAIK)
75	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	BB (SANGAT BAIK)
76	Jawa Barat	Kota Cirebon	BB (SANGAT BAIK)
77	Riau	Kabupaten Siak	BB (SANGAT BAIK)
78	Bengkulu	Kabupaten Rejang Lebong	BB (SANGAT BAIK)
79	Jawa Barat	Kota Cimahi	BB (SANGAT BAIK)
80	Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	BB (SANGAT BAIK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), BSSN

**Indeks Kearsipan
Kabupaten Majalengka Tahun 2023**

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-7-

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
51	Kota Cilegon	BB (SANGAT BAIK)
52	Kabupaten Siak	BB (SANGAT BAIK)
53	Kota Magelang	BB (SANGAT BAIK)
54	Kota Salatiga	BB (SANGAT BAIK)
55	Kabupaten Biora	BB (SANGAT BAIK)
56	Kabupaten Wonosobo	BB (SANGAT BAIK)
57	Kabupaten Belitung Timur	BB (SANGAT BAIK)
58	Kabupaten Luwu Timur	BB (SANGAT BAIK)
59	Kabupaten Kutai Kertanegara	BB (SANGAT BAIK)
60	Kabupaten Wonorejo	BB (SANGAT BAIK)
61	Kabupaten Gunungkidul	BB (SANGAT BAIK)
62	Kabupaten Trenggalek	BB (SANGAT BAIK)
63	Kabupaten Garut	BB (SANGAT BAIK)
64	Kabupaten Purbalingga	BB (SANGAT BAIK)
65	Kabupaten Banyuwangi	BB (SANGAT BAIK)
66	Kabupaten Pati	BB (SANGAT BAIK)
67	Kabupaten Magetan	BB (SANGAT BAIK)
68	Kabupaten Brebes	BB (SANGAT BAIK)
69	Kabupaten Bengkulu	BB (SANGAT BAIK)
70	Kabupaten Malang	BB (SANGAT BAIK)
71	Kabupaten Kulon Progo	BB (SANGAT BAIK)
72	Kabupaten Karanganyar	BB (SANGAT BAIK)
73	Kota Solok	BB (SANGAT BAIK)
74	Kabupaten Pacitan	BB (SANGAT BAIK)
75	Kota Mojokerto	BB (SANGAT BAIK)
76	Kabupaten Lumajang	B (BAIK)
77	Kabupaten Banyumas	B (BAIK)
78	Kabupaten Lebak	B (BAIK)
79	Kabupaten Purwakarta	B (BAIK)
80	Kabupaten Blitar	B (BAIK)
81	Kabupaten Bone	B (BAIK)
82	Kabupaten Banyuwangi	B (BAIK)
83	Kabupaten Rejang Lebong	B (BAIK)
84	Kota Bekasi	B (BAIK)
85	Kabupaten Klungkung	B (BAIK)
86	Kabupaten Pasuruan	B (BAIK)
87	Kabupaten Tabung	B (BAIK)
88	Kabupaten Majalengka	B (BAIK)
89	Kota Padang	B (BAIK)
90	Kabupaten Subang	B (BAIK)
91	Kota Malang	B (BAIK)
92	Kabupaten Ponorogo	B (BAIK)
93	Kota Cimahi	B (BAIK)
94	Kabupaten Demak	B (BAIK)
95	Kabupaten Temanggung	B (BAIK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), BSSN

**Indeks Kearsipan
Kabupaten Majalengka Tahun 2022**

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Arsip dikelola secara tertib	Indeks kearsipan	75,88	67,34	112,68

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil perbandingan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja utama indeks kearsipan pada target akhir Renstra 2018-2023 mencapai target yaitu 112,68%. Terlihat dari nilai target akhir renstra 2018-2023 sebesar 67,34 sedangkan realisasi akhir tahun 2023 (akhir periode renstra) sebesar 75,88.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Arsip dikelola secara tertib	Indeks kearsipan	75,88	90,56	83,78

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
20	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	BB (SANGAT BAIK)
21	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	BB (SANGAT BAIK)
22	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)	BB (SANGAT BAIK)
23	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)	B (BAIK)
24	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	B (BAIK)
25	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	B (BAIK)
26	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	CC (CUKUP)
27	Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)	CC (CUKUP)
28	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	C (KURANG)
29	Komisi Informasi Pusat (KIP)	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
30	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

IV. PEMERINTAH PROVINSI

NO.	NAMA PROVINSI	KATEGORI
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Jawa Tengah	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Jawa Barat	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Jawa Timur	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	DKI Jakarta	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Riau	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Lampung	A (MEMUASKAN)
8	Bengkulu	A (MEMUASKAN)
9	Jambi	A (MEMUASKAN)
10	Sumatera Selatan	A (MEMUASKAN)
11	Banten	BB (SANGAT BAIK)
12	Kalimantan Selatan	BB (SANGAT BAIK)
13	Aceh	BB (SANGAT BAIK)
14	Sulawesi Selatan	BB (SANGAT BAIK)
15	Kalimantan Barat	BB (SANGAT BAIK)
16	Kepulauan Riau	BB (SANGAT BAIK)
17	Sumatera Barat	BB (SANGAT BAIK)
18	Nusa Tenggara Barat	BB (SANGAT BAIK)

Berdasarkan tabel diatas capaian Indeks kearsipan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar $\pm 90,56$ termasuk dalam **kategori AA Sangat Memuaskan**. Jika capaian Indeks kearsipan Kabupaten Majalengka tahun 2023 dibandingkan dengan capaian indeks kearsipan Propinsi Jawa Barat, maka hasil perbandingan indeks kearsipan Kabupaten Majalengka sebesar 83,7.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan Upaya yang dilakukan di tahun depan

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator Indeks kearsipan disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal diantaranya adalah :



1. Adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan jajaran staff di lingkup urusan kearsipan dalam meningkatkan tatakelola kearsipan di daerah.
2. Kesadaran akan pentingnya arsip mulai tumbuh di daerah
3. Konsistensi dalam penatakelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan disetiap perangkat daerah lebih meningkat.

• **Upaya yang telah dilakukan**



1) Penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah lebih difokuskan.

2) Lebih meningkatkan

koordinasi dan dukungan dari para pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya dalam mendukung kebijakan daerah dibidang urusan kearsipan.



3) Dibangunnya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan didalam tatakelola kearsipan guna menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban.

• **Upaya yang akan dilakukan**

1. Penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.
2. Meningkatkan Koordinasi dan dukungan dari para pemangku kebijakan

dan
steakholder
lainnya
dalam
mendukung
kebijakan
daerah.

3. Lebih sistematis dan terukur dalam menentukan

target capaian perangkat daerah dimasa yang akan datang.



6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Pengelolaan arsip	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip	31.385.000

7. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks kearsipan pada sasaran arsip terkelola secara tertib yaitu 1,39% atau sebesar Rp. 435.900 dari pagu anggaran Rp. 31.385.000 dan realisasinya Rp. 30.949.100.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Arsip terkelola secara tertib	Indeks kearsipan	112,68	98,61



BAB 4

KESIMPULAN

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

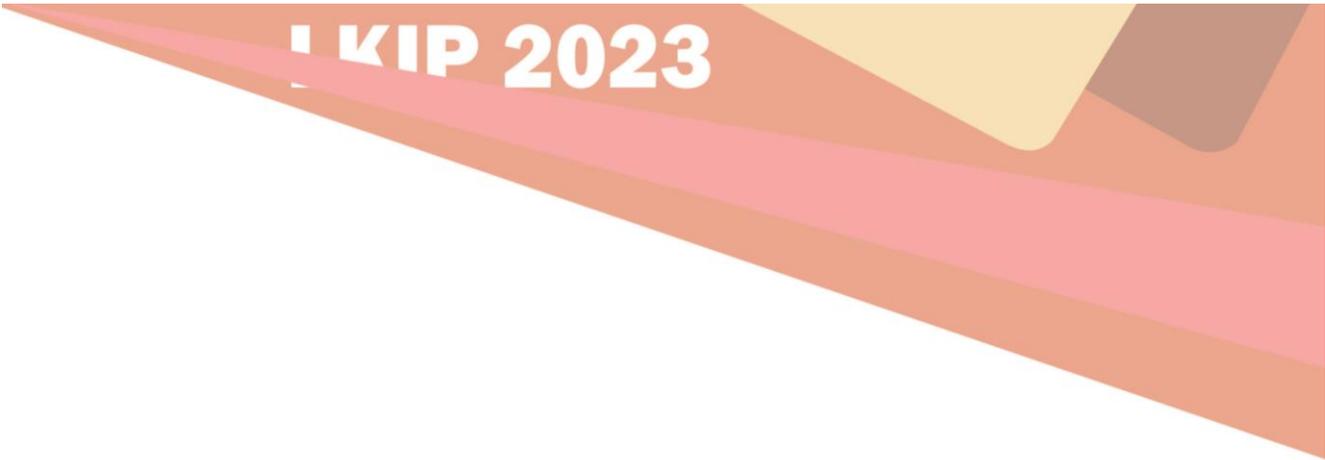
Capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yaitu sebesar 108,22%. Dari 2 IKU yang ditetapkan tersebut mencapai lebih dari 100%. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen dan kolaborasi yang baik antara pimpinan dan jajaran di lingkup Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah serta antar Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas khususnya di bidang urusan perpustakaan dan kearsipan.

Upaya yang dapat dan sudah dilakukan salah satunya yaitu mengkoordinasikan hasil pengukuran/kajian mandiri data eksisting periode januari s.d desember tahun 2023 ke pihak PERPUSNAS R.I guna merevisi hasil kajian IPLM tahun 2023.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2023 sebesar 4,17% atau Rp.222.856625,00. yang bersumber dari dana APBD dan DAK.

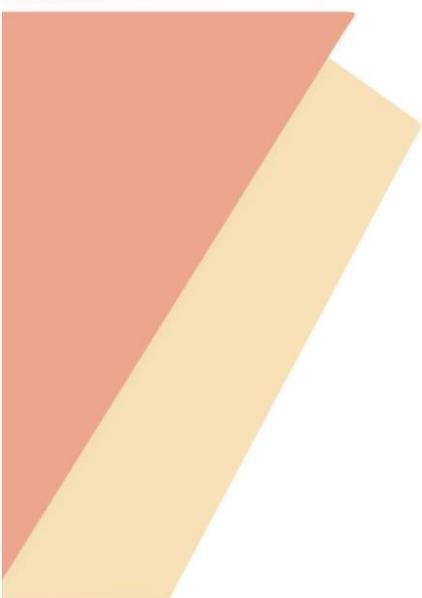
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan *stakeholder* dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang

akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat khususnya dibidang urusan kearsipan dan perpustakaan.



L KIP 2023

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI, S.H., M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI, S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	51 %
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan membaca	Indeks pembangunan literasi masyarakat	1,81 Poin
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip di setiap pencipta arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	52 %
4.	Meningkatnya pembinaan lembaga teknis kearsipan dan perpustakaan	Rasio pengelolaan arsip	52 %
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai
		Nilai SKM Perangkat Daerah	B Nilai

Bupati Majalengka,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI, S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI, S.H., M.Pd.**

Jabatan : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

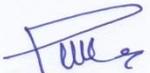
Jabatan : Bupati Majalengka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Mei 2023
Pihak Pertama,



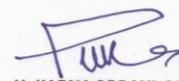
GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI, S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	80,00 (Nilai)
2	Arsip Terkelola dengan Tertib	Kualitas Pengelolaan Arsip	67,34 (Nilai)

Program	Anggaran	Keterangan
1 Pembinaan Perpustakaan	1.075.063.000,00	APBD dan DAK
2 Pengelolaan Arsip	110.207.000,00	APBD
3 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	36.592.500,00	APBD
4 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.568.784.537,00	APBD
JUMLAH	6.790.647.037,00	

Bupati Majalengka,


Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Mei 2023

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI, S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

SERTIFIKAT AKREDITASI

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang perpustakaan di Kabupaten Majalengka, pada tahun 2023 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka mendapatkan Sertifikat Akreditasi dengan predikat Akreditasi “B” yang dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS R.I).



Bidang Urusan Kearsipan

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan tatakelola kearsipan di daerah pada tahun 2023, selain nilai Indeks kearsipan yang meliputi Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE), Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah juga telah melaksanakan digitalisasi arsip dengan mengikuti Audit Pengawasan Arsip Elektronik (APAE) yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan mendapatkan nilai 60,69 dengan predikat "B".



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 395 TAHUN 2023

TENTANG
NILAI INDEKS TINGKAT DIGITALISASI ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;
 - bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Tim Pengawas Kearsipan Daerah telah melaksanakan audit pengelolaan arsip elektronik pada pemerintah kabupaten/kota sebagai pengemban level meso indikator evaluasi reformasi birokrasi general;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Kabupaten/Kota Tahun 2023;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
68	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	32,02	D (SANGAT KURANG)
69	JAMBI	KABUPATEN BATANG HARI	23,44	D (SANGAT KURANG)
70	JAMBI	KABUPATEN BUNGO	12,05	D (SANGAT KURANG)
71	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	8,13	D (SANGAT KURANG)
72	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	0,57	D (SANGAT KURANG)
73	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	95,38	AA (SANGAT MEMUASKAN)
74	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	94,30	AA (SANGAT MEMUASKAN)
75	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	92,51	AA (SANGAT MEMUASKAN)
76	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	90,24	AA (SANGAT MEMUASKAN)
77	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	89,59	A (MEMUASKAN)
78	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	85,12	A (MEMUASKAN)
79	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	82,71	A (MEMUASKAN)
80	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	79,20	BB (SANGAT BAIK)
81	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	76,78	BB (SANGAT BAIK)
82	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	69,13	B (BAIK)
83	JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	68,96	B (BAIK)
84	JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKARTA	67,68	B (BAIK)
85	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	66,49	B (BAIK)
86	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	65,58	B (BAIK)
87	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	64,51	B (BAIK)
88	JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	61,76	B (BAIK)
89	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	60,69	B (BAIK)
90	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	59,53	CC (CUKUP)
91	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	56,62	CC (CUKUP)
92	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	53,71	CC (CUKUP)
93	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	53,13	CC (CUKUP)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

**KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN 2023**

NO.	KEBIJAKAN	KEGIATAN	KERJASAMA
1.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37)	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Arsip dan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama antara Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka dan Universitas Terbuka Bandung, meliputi: Penyelenggaraan pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
2.		Pendampingan Penyelenggaraan dan Pengelolaan serta Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan melalui Peminjaman Koleksi Perpustakaan sesuai Kewenangan	Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama antara Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Majalengka



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jln. Raya Cigasong – Jatiwangi Kel. Cicenang Kec. Cigasong
Website : diskapus.majalengkakab.go.id / email : disarpusda@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR / DISARPUSDA / 2024

TENTANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan serta sasaran Organisasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2023;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

KEDUA.....

- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan Laporan Capaian Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka kepada Bupati Majalengka sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA


GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI, SH.,M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 196803271996031003

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth :

1. Yth .Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sdr. Kepala Bagian Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Yth. Sdr. Sekretaris, Para Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Para Fungsional di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jln. Raya Cigasong – Jatiwangi Kel. Cicenang Kec. Cigasong
Website : diskapus.majalengkakab.go.id / email : disarpusda@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. Bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam amanat Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2020 Pasal 13 adalah kewajiban Perangkat Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKIP OPD) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Uraian Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pe KEDUA....
Organisasi Perangkat Daerah (LKIP OPD) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023

sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA


GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI, SH.,M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 196803271996031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth .Bapak Pj. Bupati Majalengka;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sdr. Kepala Bagian Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Yth. Sdr. Sekretaris, Para Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : Tahun 2024

TANGGAL : 02 Januari 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS / KANTOR
1.	Penanggung Jawab :	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
2.	Ketua :	Sekretaris pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
3.	Sekretaris :	Fungsional Perencana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
4.	Anggota :	1. Kepala Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
		2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
		3. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
		4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
		5. Fungsional Arsiparis pada Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
		6. Fungsional Arsiparis pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
		7. Fungsional Pustakawan pada Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
		8. Para Fungsional Arsiparis dan Pustakawan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
		9. Para Fungsional Umum pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI, S.H.,M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 196803271996031003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP
DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : Tahun 2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

I. Penanggung Jawab

1. Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

II. Ketua

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

III. Sekretaris

1. Menyelenggarakan Administrasi Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Membantu ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

IV. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA


GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI, S.H.,M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 196803271996031003